



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
1. Mendorong pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yang berbasis otonomi daerah.	Lampiran I dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemendagri, dan Pemda					

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
2. Pengembangan sentra industri maritim.	Lampiran II dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, dan Pemda					
3. Pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan.	Lampiran II dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, dan Pemda					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
Tatanan Kepelabuhanan Perikanan								
a. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					

b. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
b. Peningkatan jangkauan pelayanan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan, terluar, dan tertinggal.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
c. Pemantapan pelabuhan perikanan sebagai pendorong pertumbuhan wilayah.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
d. Pengembangan pelabuhan perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
e. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan.		APBN, APBD	KKP, Kemen-Koperasi dan UKM, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda					

II. PERWUJUDAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran VIII							
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Peningkatan pengelolaan SDI yang berkelanjutan di wilayah perairan.		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
b. Penetapan standar kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan di zona perikanan atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP, Pemda, dan Instansi Terkait					
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing.		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, dan Instansi Terkait					

d. Pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
d. Pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di zona perikanan atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan efektifitas perijinan perikanan tangkap nasional.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
f. Peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Pemantapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					

h. Penelitian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 - 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
h. Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan		APBN, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan LIPI					
1.b. Zona Perikanan Budi daya	Lampiran VIII							
a. Penyiapan kebijakan pengendalian kesehatan lingkungan di zona perikanan budi daya.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Peningkatan pengelolaan sistem perbenihan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
c. Peningkatan pengelolaan zona perikanan budi daya.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
d. Peningkatan pengelolaan penyediaan pakan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
f. Pemantapan pengawasan pengendalian kesehatan lingkungan di zona perikanan budi daya.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Pengembangan usaha pembudidayaan ikan, khususnya di laut dalam		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Maritim, KKP, LIPI, dan Pemda					

2. Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020 – 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
2. Zona Pariwisata	Lampiran VIII							
a. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
b. Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, dan Pemda					
c. Pemantapan pengawasan pengendalian kesehatan lingkungan di zona pariwisata.		APBN, APBD	Kemenpar dan Pemda					
d. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen - PUPR, dan Pemda					
e. Fasilitasi dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen - PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, dan Pemda					

f. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
f. Pengembangan kegiatan wisata di lokasi BMKT.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
g. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola zona pariwisata		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi dan daya tarik zona pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
3. Zona Industri Kelautan	Lampiran VIII							
a. Percepatan pengembangan zona industri kelautan yang ramah lingkungan.		APBN, APBD	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
b. Penyiapan masterplan kawasan pengembangan industri kelautan.		APBN, APBD	Kemenperin, Kemen ATR/ BPN, KKP, dan Pemda					
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung industri kelautan		APBN, APBD, investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
d. Peningkatan pertumbuhan industri hulu di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
e. Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
f. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dan penyebaran kegiatan industri di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
g. Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal perikanan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
h. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri kelautan		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, Kemen-LHK, dan Pemda					
4. Zona Pertambangan	Lampiran VIII							

4.a. Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
4.a. Zona Pertambangan Minerba								
a. Penawaran wilayah kerja minerba.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
b. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan minerba yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
4. b. Zona Pertambangan Migas								
a. Penawaran wilayah kerja migas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur usaha migas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
c. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan migas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
5. Zona Pengelolaan Energi	Lampiran VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
b. Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik aneka energi baru dan terbarukan, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau terluar.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM, Kemenhan, KKP, BNPP, dan Pemda					
c. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan panas bumi.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, BPPT, Pemda, dan Perguruan Tinggi					
6. Zona Pertahanan dan Keamanan	Lampiran VIII							
a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar / Terdepan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, dan TNI					
b. Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemenkominfo dan TNI					

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 - 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.		APBN	Kemenhan, KKP, BNPP, dan TNI					
7. Zona Transportasi	Lampiran VIII							
a. Pengembangan prasana dan sarana kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan yang menggunakan ruang laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub dan Kemen-PUPR					
b. Penyiapan masterplan pengembangan kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan yang menggunakan ruang laut.		APBN, investasi dunia usaha	KKP, Kemenhub, dan Kemen-PUPR					
c. Pengembangan prasana dan sarana pengolah limbah dan sampah di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.		APBN, investasi dunia usaha	KKP dan Kemen-PUPR					
B. Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Lampiran IX							

a. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
a. Penyusunan masterplan SKPT.		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
b. Pembangunan dan Pengembangan SKPT.		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
2. Pengembangan Kawasan Penghasil Produksi Ikan Secara Berkelanjutan.	Lampiran IX	APBN, investasi dunia usaha	KKP					
3. Proyek Strategis Nasional	Lampiran IX							
a. Pembangunan infrastruktur jalan tol.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
b. Pembangunan infrastruktur jalan nasional/strategis nasional non jalan tol.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
c. Revitalisasi bandar udara.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
d. Pembangunan bandar udara baru.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
e. Pembangunan bandar udara strategis lainnya.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
f. Pembangunan Pelabuhan Baru dan pengembangan kapasitas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					

g. Proyek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
g. Proyek pipa gas/terminal LPG/pengembangan dan pembangunan fasilitas produksi migas.		APBN, investasi swasta	Kemen-ESDM					
h. Pembangunan Tanggul Penahan Banjir.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
i. Peningkatan jangkauan broadband		APBN, investasi dunia usaha	Kemenkominfo					
j. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin,					
k. Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR dan Kemenpar					
l. Pembangunan smelter.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin					
m. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
n. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan PLN					
o. Pembangunan interkoneksi kabel bawah laut antar pulau		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan PLN					

C. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
C. Kawasan Konservasi (KK)								
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).	Lampiran V dan VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah perairan		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKP3K.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan batas KKP3K		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKP3K secara efektif		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)	Lampiran VI dan VIII							
a. Identifikasi lokasi BMKT sebagai KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan batas KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKM secara efektif.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					

3. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Lampiran V dan VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah perairan		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKP.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan Batas KKP.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKP secara efektif.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
D. Alur Laut								
1. Alur Pelayaran	Lampiran VIII							
a. Pemantapan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana jaringan pelayaran.		APBN	Kemenhan dan Kemenhub					
b. Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran.		APBN	Kemenhub dan KKP					

c. Identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Identifikasi dan submisi lokasi PSSA.		APBN	Kemenhub, KKP, dan Kemenko Maritim					
2. Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	Lampiran VIII							
a. Penyiapan masterplan pemasangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, Kemenkominfo dan Kemen- ESDM					
b. Penyiapan peraturan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di laut untuk jaringan pipa/kabel bawah laut dan/atau bangunan dan instalasi di laut.		APBN	KKP					
c. Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemenhub, Kemenkominfo Kemen-ESDM					
3. Alur Migrasi Biota Laut	Lampiran VIII							
a. Identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen- LHK, Pemda, dan LSM					

b. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
b. Peningkatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut.		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, dan LSM					
c. Pencegahan dampak lingkungan terhadap alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, dan LSM					
E. Kawasan Strategis								
1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Yang Memiliki Cakupan Wilayah Laut dan/atau Perairan Pesisir	Lampiran X							
a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi KSN yang terintegrasi dengan Perpres RTR KSN.		APBN	KKP, Kemen-ATR/BPN, Kemenko Maritim, dan Kemenko Perekonomian					
b. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN, dan Kemenko Perekonomian, Pemda					

c. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, dan Pemda					
2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Lampiran VII							
a. Identifikasi dan pemetaan lokasi KSNT yang terkait dengan : - pelestarian lingkungan hidup (daerah cadangan karbon biru, kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis); - situs warisan dunia (cagar budaya nasional dan situs warisan dunia yang alami).		APBN	Kemen-LHK, KKP, Kemenpar, Kemenko Maritim, dan Kemendikbud					
b. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi dan/atau masterplan KSNT (PPKT).		APBN	KKP					

c. Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Rehabilitasi / Revitalisasi Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
d. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
e. Pembangunan TPS terapung dan pusat daur ulang sampah di PPKT.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
f. Pengelolaan efektif KSNT yang terkait dengan : - daerah cadangan karbon biru; - kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; - cagar budaya nasional; - situs warisan dunia yang alami.		APBN	Kemen-LHK, KKP, Kemenpar, Kemenko Maritim, dan Kemendikbud					
III. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Pengembangan Tatanan Kepelabuhan Perikanan	Lampiran III dan IV							

1. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
1. Peningkatan jangkauan pelayanan pelabuhan perikanan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE).		APBN	KKP					
2. Peningkatan armada kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
IV. DUKUNGAN PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran VIII							
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Identifikasi potensi sediaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
b. Pengembangan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional.		APBN	KKP dan Kemenlu					

c. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing di ZEE.		APBN	KKP					
d. Pengembangan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
e. Pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di ZEE.		APBN	KKP					
f. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap sesuai sediaan Sumber Daya Ikan di zona perikanan		APBN	KKP					
2. Zona Pertambangan	Lampiran VIII							
a. Identifikasi potensi sumber daya pertambangan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	Kemen-ESDM					
b. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan di ZEE dan landas kontinen		APBN	Kemen-ESDM					

c. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya pertambangan di ZEE dan landas kontinen secara berkelanjutan		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi tambang di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
e. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut di ZEE dan landas kontinen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					

f. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
f. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
3. Zona Pengelolaan Energi	Lampiran VIII							
a. Identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	Kemen-ESDM					
b. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					

c. Pengaturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
c. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut untuk pemanfaatan sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
e. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemen-ESDM					
B. Kawasan Konservasi	Lampiran VIII							

1. Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I (2018 – 2019)	II (2020- 2024)	III (2025 – 2029)	IV (2030 – 2034)	V (2035 – 2037)
1. Perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi di ZEE dan landas kontinen.		APBN	KKP					
2. Pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	KKP					
3. Pengembangan kerjasama antar negara atau melalui organisasi internasional untuk pengelolaan kawasan konservasi di ZEE dan landas kontinen		APBN	KKP dan Kemenlu					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bebati Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman